



PUTUSAN
Nomor 115/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT UMBUL MAS WISESA, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152, yang diwakili oleh Anita Ridhani, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3064/PJ/2019, tanggal 11 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85891/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat meninjau kembali Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-92/WPJ.01/2015, tanggal 20 Januari 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00099/407/12/123/13, tanggal 24 Desember 2013, Masa Pajak Desember 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.790.815.3-123.000, dan menetapkan kembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Ekspor	Rp -
b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 3.831.706.028,00
c.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp -
d.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp -
e.	Penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp 16.734.351,00
	Jumlah Penyerahan	Rp 3.848.440.379,00
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 383.170.603,00
	Dikurangi:	
a.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 13.409.263.311,00
3	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp(13.026.092.708,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85891/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/WPJ.01/2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00099/407/12/123/13, tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Umbul Mas Wisesa, NPWP 01.790.815.3-123.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 85891/PP/M.XIVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 28 Agustus 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 11 September 2017, telah cacat hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 85891/PP/M.XIVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 28 Agustus 2017 dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tanggal 11 September 2017;
4. Mengadili sendiri:
 - a. Menolak Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 85891/PP/M.XIVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 28 Agustus 2017;
 - b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/WPJ.01/2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00099/407/12/123/13, tanggal 24 Desember 2013, Masa Pajak Desember 2012 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- d. Atau Seandainya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00099/407/12/123/13, tanggal 24 Desember 2013 atas nama PT Umbul Mas Wisesa, NPWP 01.790.815.3-123.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt 7, Jalan Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Medan 20152;

Dapat dibenarkan karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/WPJ.01/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022



Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00099/407/12/123/13, tanggal 24 Desember 2013, atas nama PT Umbul Mas Wisesa, NPWP 01.790.815.3-123.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lt 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan 20152 dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum:

- Bahwa *in casu* berdasarkan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 16B ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) *juncto* Pasal 1 angka 1 huruf c, Pasal 1 angka 2 huruf a, Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, pada dasarnya Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan apabila ada penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- Bahwa pada Masa Pajak Desember 2012 tidak ada penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN dan/atau penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi pada dasarnya berkaitan erat dengan CPO yang penyerahannya terutang PPN (tidak ada bibit atau pupuk maka tidak akan ada CPO);
- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.11/2014 mempertegas bahwa Pajak Masukan untuk perusahaan sawit titip olah dapat dikreditkan walaupun Peraturan Menteri Keuangan berlaku untuk tahun 2014, tetapi dasar yang dipakai adalah Pasal 16B UU PPN sehingga berpatokan pada UU PPN, yaitu apabila tidak terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan apabila terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN disamping penyerahan yang terutang PPN maka Pajak Masukannya akan dihitung kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
- Bahwa oleh karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp920.180.356,00 tidak dapat dipertahankan sehingga permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) haruslah dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85891/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT UMBUL MAS WISESA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85891/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 28 Agustus 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT UMBUL MAS WISESA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 115/B/PK/Pjk/2022